**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Saat ini, posisi Indonesia di dunia internasional mulai dipertimbangkan. Hal tersebut diperlihatkan dengan status Indonesia menjadi *Middle Income Country* dan sebagai anggota G-20, yang dipertegas dengan *Jakarta Commitment 2009* dan *Busan Outcome Document 2011* membawa konsekuensi peningkatan peran Indonesia di dunia internasional. Selain peran aktif Indonesia di dunia internasional, kontribusi Indonesia untuk negara-negara berkembang lainnya juga menjadi fokus dalam kerja sama pembangunan maupun dalam menjalin kemitraan global.[[1]](#footnote-1)

G-20 sudah memulai aktivitasnya sejak dibentuk pada tahun 1999 di Jerman. Namun forum *intergovernmental* ini baru dikenal komunitas internasional secara luas terutama sejak tahun 2008. G-20 dibangun sebagai terobosan baru dalam kerjasama multilarisme. Jumlah anggotanya yang 20 dipandang signifikan dan sistematik. Keduapuluh anggota secara keseluruhan menguasai 80% lebih perekonomian dunia yang ditandai dengan pertumbuhan GNP, penguasaan aliran investasi asing, pasar, perdangan dunia dan populasi dunia. Asumsi yang diyakini adalah bahwa bila perekonomian di keduapuluh anggota ini sehat, maka akan sehat pula perekonomian seluruh dunia.[[2]](#footnote-2)

 Latar belakang pembentukan forum ini berawal dari terjadinya Krisis Keuangan 1998 dan pendapat yang muncul pada forum G-7 mengenai kurang efektifnya pertemuan itu bila tidak melibatkan kekuatan-kekuatan ekonomi lain agar keputusan-keputusan yang mereka buat memiliki pengaruh yang lebih besar dan mendengarkan kepentingan-kepentingan yang barangkali tidak tercakup dalam kelompok kecil itu.[[3]](#footnote-3)

Indonesia telah menjadi anggota G-20 sejak forum *intergovernmental* ini dibentuk di tahun 1999. Bagi Indonesia klub ekslusif ini merupakan wilayah bergengsi tinggi di mana Indonesia dapat mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya. Namun Indonesia memahami posisi strategis dan tanggungjawab untuk mewakili Negara-negara berkembang. Indonesia merupakan anggota satu-satunya ASEAN yang menjadi anggota tetap G-20. Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang di masa lampaunya pernah mengalami krisis ekonomi dahsyat dan kini telah berhasil mengatsainya perlahan dengan relative baik sehingga bisa bergabung dengan anggota G-20.[[4]](#footnote-4)

Salah satu kebijakan G20 yang sejalan dengan prioritas Indonesia adalah peningkatan pertumbuhan kolektif sebesar 2,1% selama 5 tahun kedepan, dimana hal ini dapat mendorong pertumbuhan Indonesia sesuai target yaitu 7%. Fokus pembangunan infrastruktur sebagai agenda utama G20 yang dapat mendukung kepentingan Indonesia terhadap berbagai arah fasilitas internasional yang terbentuk.[[5]](#footnote-5)

Dewasa ini kebutuhan dunia akan infrastruktur terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi. Dalam jangka panjang, GDP dunia diperkirakan akan tumbuh kuat dan mungkin bisa mencapai dua kali lipat selama periode tahun 2030. Pertumbuhan ekonomi tertinggi diperkirakan terjadi di wilayah Asia/Pasifik, Cina dan India.[[6]](#footnote-6) PDB per kapita di negara-negara berpendapatan tinggi diperkirakan akan terus meningkat, bahkan lebih tinggi dari PDB rata-rata per kapita negara berkembang. PDB per kapita Cina dan India bisa meningkat tiga sampai empat kali pada tahun 2030.  **Tabel 1 : Proyeksi Kebutuhan Investasi untuk Infrastruktur**



Sejalan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi dunia, kebutuhan akan infrastruktur juga akan terus meningkat. *The Infrastructure to* 2030 (OECD, 2006-07) menyimpulkan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur global yang mencakup transportasi darat (jalan, rel), telekomunikasi, listrik dan sektor air akan mencapai sekitar USD53 triliun lebih selama periode 2010-2030. Pertumbuhan kebutuhan investasi per tahun akan mencapai sekitar 2,5% dari GDP dunia, dan akan meningkat menjadi 3,5% dari PDB apabila memperhitungkan kebutuhan investasi untuk pembangkit listrik dan energi lainnya seperti minyak, gas dan batubara.

Bagaimana dengan Indonesia? Tampaknya peningkatan infrastruktur diperkirakan menjadi komponen kunci dalam upaya pemerintah untuk menarik investasi yang lebih besar bagi ekspansi dan daya saing ekonomi. Pembangunan infrastruktur merupakan tantangan utama yang harus segera diatasi.

Secara umum, perkembangan infrastruktur Indonesia, dinilai jalan di tempat dan tidak mampu mengejar pertumbuhan ekonomi serta kemajuan di negara lain. Dalam Global Competitiveness Report 2008-2009, Indonesia berada di urutan ke-86 dari 134 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia (23), Thailand (29), China (47), India (72), Sri Lanka (65) dan Pakistan (85) (2). Kondisi infrastruktur secara umum diperkirakan belum akan banyak berubah, kendati beberapa langkah terobosan sudah ditempuh.

Diperkirakan listrik merupakan infrastruktur yang akan lebih dulu pulih disusul dengan jalan raya, terutama jalan tol, tetapi infrastruktur lain masih jauh tertinggal dengan negara lain. Telekomunikasi mungkin yang paling mapan karena ditolong oleh teknologi seluler. Gambaran lebih buruk terlihat pada infrastruktur yang terkait dengan masyarakat, seperti pengairan, sanitasi, air bersih, dan angkutan umum massal, yang semestinya menjadi prioritas.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur masih merupakan tantangan besar yang harus diatasi. Pemerintah terus berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur, namun banyak kendala yang dihadapi, mulai dari masalah pendanaan hingga persoalan teknis di lapangan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,73 persen per September 2015 masih jauh dari harapan, terutama karena Indonesia membutuhkan pertumbuhan minimal 7 persen agar dapat menjadi negara maju pada tahun 2025. Dengan menganut semangat percepatan, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka mendorong investasi untuk beragam sektor terkait infrastruktur.

Penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena adanya kendala di berbagai tahapan proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Secara keseluruhan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan. Selain dukungan fiskal, keterbatasan jaminan Pemerintah yang dapat diberikan pada proyek infrastruktur juga menurunkan minat investasi di Indonesia.[[7]](#footnote-7)

Para pemimpin G20 sepakat membentuk *Global Infrastructure Initiative* yang bertujuan sebagai jaringan dan tempat berbagi informasi dan pengalaman antara pemerintah, sektor swasta, bank pembangunan dan organisasi internasional. Pemimpin G20 juga seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pidato laporan kinerja lembaga Negara, salah satu tema penting yang dilaporkan Jokowi adalah percepatan infrastruktur. Pemerintah memfokuskan tersebut untuk mengetaskan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial. “Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial," kata Jokowi. "Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan perumahan rakyat."[[8]](#footnote-8)

Melihat perkembangan agenda infrastruktur dalam G-20, dapat dikatakan bahwa ada kesepakatan diantara negara anggota G-20, terutama negara-negara berkembang untuk menempatkan agenda infrastruktur sebagai agenda penting dan krusial tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara global, akan tetapi juga dapat mendorong pembangunan dan mengurangi kesenjangan global. Perkembangan ini tentu saja menarik dan positif. Selama ini persoalan infrastruktur dianggap sebagai sebuah isu domestik dan hanya dilihat sebagai bagian dari kerangka pembangunan nasional, dan bukan terkait dengan persoalan pertumbuhan dan kestabilan ekonomi di tingkat global.

**Tabel 2. Perkembangan Agenda Infrastruktur dalam Pertemuan G-20**

****

Agar MP3EI ini dapat terwujud, dibutuhkan investasi dalam jumlah yang sangat besar yaitu Rp 4.012 triliun. Namun untuk mencapai nilai investasi tersebut, pemerintah membutuhkan investasi dari pihak-pihak lain karena pemerintah hanya mampu menyediakan sekitar 10% dari total investasi yang dibutuhkan.

Selain dari BUMN dan swasta, pemerintah Indonesia dapat mengajak negara lain terutama negara G-20 untuk melakukan investasi di Indonesia. Di antara negara G-20, China, Rusia, dan Korea Selatan merupakan negara-negara yang berpotensi untuk melakukan investasi di Indonesia. Negara yang memiliki potensi terbesar sebagai investor untuk mewujudkan MP3EI adalah China.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa sejauh ini fasilitas infrastruktur di Indonesia memperlihatkan adanya ketimpangan secara geografis, dengan pembangunan infrastruktur di Sumatera dan Jawa lebih baik dibnadingkan dengan wilayah lainnya. Tantangan ke depan bagi Indonesia adalah tidak sekedar bagaimana mengoptimalkan pendanaan bagi infrastruktur tapi bagaimana pembangunan infrastruktur itu juga dapat mengurangi ketimpangan antarwilayah di Indonesia.

Agenda pembangunan infrastruktur di G-20 setidaknya telah membuat forum G-20 tidak hanya sekedar forum stabilisasi keuangan tetapi juga menjadi forum untuk agenda pembangunan infrastruktur. Agenda baru ini tentu saja sangat terkait dengan kepentingan Indonesia yang mengalami masalah dalam memobilisasi sumber pendanaan domestik untuk pembangunan infrastruktur. Dalam kaitan ini tidak semua negara anggota G-20 memiliki kapasitas untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Fenomena ini menurut penulis menjadi menarik untuk dicermati. Penelitian ini telah mengeksplorasi berbagai pendapat tentang eksistensi G-20 sebagi forum utama kerjasama ekonomi internasional tentang peran dan kepentingan Indonesia dalam forum utama kerjasama ekonomi internasional tersebut. Dan setelah menemukan kepentingan Indonesia dalam mengikuti forum G-20, penulis akan meneliti pengaruhnya terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi sebagai salah satu syarat menempuh S1 dengan judul : **“PENGARUH KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM FORUM G-20 TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terkait dengan judul laporan skripsi yang peneliti ambil, permasalahan yang muncul dalam tema penelitian, dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana posisi Indonesia di forum G-20?
2. Bagaimana kondisi pembangunan infrastruktur di Indonesia?
3. Bagaimana G-20 berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia?
4. **Pembatasan Masalah**

Tujuan dari pembatasan masalah adalah untuk menuntun penulis melakukan analisis sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Pembatasan masalah juga membantu penulis agar menghindari penjelasan yang terlalu meluas. Dalam skripsi ini, batasan masalah penulis memfokuskan pada Indonesia dan G20 : mengenai posisi Indonesia di forum G-20 dan kondisi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

1. **Perumusan Masalah**

Dalam penyusunan suatu skripsi, peneliti harus memahami permasalahan penelitiannya. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini sebagai berikut : **“Bagaimana Pengaruh Keberadaan Indonesia di forum G-20 terhadap Pembangunan Infrastruktur di Indonesia”**

1. **Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban akan masalah yang telah dituangkan dalam identifikasi masalah peneliti, tentang perngaruhnya G-20 terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisa posisi Indonesia di forum G-20.
2. Mengetahui dengan menganalisa kondisi pembangunan infrastruktur di Indonesia.
3. Mengetahui, menganalisa dan menjabarkan bagaimana G-20 berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di Indoenesia.
4. **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah manfaat yang diperoleh penelitian baik secara akademik, maupun secara aplikatif bagi masayarakat pada umumnya, namun juga pembaca yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap forum kerjasama ekonomi internasional yaitu *Group Twenty* dalam mengatasi krisis ekonomi dunia dan juga pembangunan infrastruktu di Indonesia . Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai prasyarat bagi peneliti untuk menyelesaikan Studi Strata S-1 dan mendapat gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan Bandung.
2. Sebagai pembanding dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema atau topik yang sama, yaitu seputar kerjasama ekonomi internasional dan pembangunan infrastruktur.
3. Sebagai sebuah sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan diaplikasikannya dalam bentuk tulisan yang didasari oleh teori-teori empiris.

1. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
2. **Kerangka Teoritis**

Untuk memahami suatu permasalahan dan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian di atas, diperlukan adanya sebuah kerangka berpikir. Kerangka pemikiran ini terdiri dari teori dan konsep yang berguna sebagai acuan dan panduan dalam melakukan penelitian. Sehingga penelitian ini dapat memenuhi prosedur ilmiah dan ditopang oleh pendapat para pakar hubungan internasional dan para pakar yang kompeten dalam penelitian ini, diharapkan hasilnya tidak jauh dari sifat yang ilmiah dan diharapkan bisa dipertanggung jawabkan secara akademis.

 Berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Negara berkembang dan Negara maju di dalam forum G-20, serta kerjasama yang dilakukan keduanya dengan organisasi atau Negara lain dalam rangka menyelesaikan krisis ekonomi dunia dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

 G20 yang dalam permasalah yang penulis angkat, yang merupakan organisasi internasional multilateral, memiliki hak dan kewajiban serta otoritas dalam menyelesaikan konflik (tujuan bersama) yang berkaitan dengan Negara anggota organisasinya,organisasi internasional merupakan suatu organisasi yang baik gerak, maupun pelakunya melintasi batas sebuah negara, berangkat dari kesepakatan masing-masing anggota untuk bekerjasama, memiliki regulasi yang mengikat anggota, dan untuk mewujudkan tujuan internasional tanpa meleburkan tujuan nasional dari masing-masing anggota dari organisasi internasional yang bersangkutan.

Konsep rezim internasional banyak mempengaruhi efektif dan tidak efektifnya berargumen bahwa berbagai institusi atau rezim internasional mempengaruhi perilaku negara-negara (maupun aktor internasional yang lain) **Krasner (1982).** Rezim internasional muncul untuk menjawab kemungkinan kerjasama antar negara dalam situasi anarki sistem internasional yang tidak memiliki otoritas kekuasaan terpusat. Anarkhi tidak berarti chaos karena masih terdapat aturan *(rules)* dalam sistem internasional. Terdapat banyak definisi rezim internasional namun yang banyak menjadi rujukan adalah pendapat **Krasner (1983)** yaitu : ***”International Regimes are defined as principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actor expectations converge in a given issue area”.*** Rezim dapat didefinisikan mencakup seperangkat prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan dan prosedur pembuatan kebijakan yang implisist maupun eksplisit yang muncul dari bertemunya ekspektasi para aktor di dunia internasional. [[9]](#footnote-9)

G20 merupakan rezim, yang tidak memiliki institusi atau kantor tetap. Setiap tahun, terjadi pergantian troika (kepemimpinan) untuk pengadaan summit. Meskipun tidak *legally binding* (mengikat secara hukum) namun G20 menghasilkan seperangkat prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan dan prosedur pembuatan kebijakan.

G20 membutuhkan negara yang mampu menjaga stabilitas kerjasamanya. Teori ini tidak mengatakan bahwa ekonomi internasional tidak akan dapat eksis dan berfungsi tanpa kehadiran hegemoni. Teori ini mengatakan bahwa tipe tertentu dari orde ekonomi internasional, dalam hal ini liberal, tidak dapat maju dan mencapai perkembangan penuh tanpa kehadiran suatu kekuatan hegemoni.

Rezim menjalankan fungsi penting yang dibutuhkan dalam hubungan antar negara. Rezim merupakan aktor independen dalam politik internasional. Rezim ketika dilembagakan akan dijaga keutuhannya sehingga kehadirannya dapat memberikan pengaruh politik melebihi independensi negara-negara yang menciptakannya.

G-20 merupakan kerjasama internasional yang muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing Negara yang berbeda, sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidaklah sama. Hal ini menjadikan Negara membutuhkan kemampuan yang Negara lain atau aktor hubungan internasional lain hingga organisasi internasional untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Kerjasama internasional akan menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan satu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat maksimalkan sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar aktor hubungan internasional yang bekerjasama. Menurut **Kalevi Jaako Holsti**, Kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut :

* + 1. ***Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.***
		2. ***Pandangan atau harapan dari suatu Negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya akan membantu Negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.***
		3. ***Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua Negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.***
		4. ***Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan pesretujuan.***
		5. ***Transaksi antar Negara untuk memenuhi persetujuan setiap pihak.[[10]](#footnote-10)***

Dalam kerangka kerjasama internasional, koordinasi kebijakan dan *collective action* diperlukan untuk meningkatkan output dan menurunkan resiko global melalui pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan berimbang. Penguatan dan kerjasama yang kooperatif antar negara akan menciptakan pertumbuhan dalam jangka menengah yang lebih stabil dan tahan terhadap goncangan krisis yang mungkin terjadi lagi. Simulasi yang dilakukan IMF menunjukkan bahwa reformasi kebijakan pasar barang dan tenaga kerja, serta kebijakan rebalancing di Negara-negara surplus-defisit utama, akan menaikkan GDP global sebesar 2,25 triliun dolar pada tahun 2018 (IMF, 2014). Indonesia dapat memainkan peranan aktif dengan serangkain kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang harmonis dengan prioritas kebijakan G20 tanpa mengesampingkan kepentingan ekonomi nasional. [[11]](#footnote-11)

Teori yang kedua, penulis menggunakan **Teori Kepentingan Nasional**. G20 menjadi organisasi yang mewadahai kepentingan nasional Negara-negara maju dan berkembang yang pada dasarnya memiliki karakteristik, kepentingan-kepentingan tersebut bisa kemudian diterjemahkan menjadi kerjasama antar Negara anggota yang memberikan manfaat untuk Negara-negara terkait dan non anggota.

Dalam hubungan internasional tentunya ada sutau hal yang mendasari suatu Negara kenapa melakukan hubungan atau interaksi dengan Negara lain. Adanya suatu tujuan tertentu yang menjadi fokus suatu Negara melakukan interaksi dengan Negara lain. Tujuan dan fokus tersebut adalah kepentingan nasional *(Nastional Interest)* yang merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan interaksi dengan Negara lain.[[12]](#footnote-12)

Dalam proses mencapai kepentingan nasional, setiap Negara akan berhubungan dengan Negara lain. Hubungan atau interaksi antar lebih dari dua Negara yang berkesinambungan atau intens cenderung akan membentuk sebuah wadah, wadah tersebut disebut Organisasi Internasional. Sebagaimana terlihat dalam perjalanan pembentukan G-20. Indonesia bergabung dengan G-20 karena memiliki kepentingan nasional yaitu untuk penanganan krisis ekonomi sejak 1990an, setelah mengalami krisis ekonomi dua kali, Indonesia memiliki kesempatan untuk memberi kontribusi pada pembentukan arsitektur ekonomi global yang terhadap krisis serupa yang mungkin terjadi di masa depan.

Peningkatan daya saing bangsa di tingkat global, daya saing masih lemah, dan karenanya Indonesia perlu membuat upaya serius meningkatkankannya. Dan kepentingan untuk peningkatan citra di forum internasional. Indonesia ingin menunjukan jembatan perbedaan tujuan politik luar negeri untuk meningkatkan citra Indonesia melalui diplomasi politik. Peran Indonesia dalam setiap KTT G-20 mengajukan kepentingan Negara berkembang dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia dapat mengedepankan pendekatan kontruktif dalam pemabahan isu di G-20.

Terakhir penulis menggunakan konsep pembangunan. Menurut pengertian ilmu ekonomi yang ketat, istilah pembangunan secara tradisinional sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi-kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama **(Todaro : 2008)** . Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan dan meningkatkan produktivitas. Untuk itu sebelum beribicara pembangunan, Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Penggunaan indikator dan variable pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar. Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional anatar lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indikator lainnya yang menunjukan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH) dan Indeks Pembangunan Manusia (Deddy T. Tikson : 2005). Sedangakan infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dll.[[13]](#footnote-13)

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Pembangunan infrastruktur di bagi dengan pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik. Menurut B.S Muljana (2001:3) pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik daan pertahanan keamanan. Fisik dalam istilah pembangunan meliputi sarana dan juga prasarana pemerintahan seperti jalan, jembatan, pasar, pertanian dan irigrasi.[[14]](#footnote-14)

Didalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembanguan fisik saja tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Bachtiar Effendi (2002:114) oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisiknya. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

1. **Hipotesis**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas serta didukung dengan menggunakan teori-teori maupun konsep-konsep sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa :

**“Jika keanggotaan Indonesia diarahkan untuk mendapatkan kerjasama pembangunan dengan Negara-negara anggota G-20 maka pembangunan infrastruktur di Indonesia akan meningkat ditandai dengan penambahan fasilitas dan program-program pembangunan infrastruktur baru.”**

1. **Pengujian Hipotesis / Verifikasi Data**

**Tabel 3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** **(Hipotesis)** | **Indikator****(Empirik)** | **Verifikasi****Analisa Data**  |
| ***Variabel Bebas:*** Jika keanggotaan Indonesia diarahkan untuk mendapatkan kerjasama pembangunan dengan Negara-negara anggota G-20 | 1. Hasil KTT G20 agenda pembangunan
2. Arahan Presiden Jokowi dalam KTT G20 untuk mengajak kerjasama pembangunan dengan anggota G-20
3. Program Kerjasama invetasti infrastruktur
 | * Hal ini tergambarkan pada progress report 2012 dari development working group G-20 yang menetapkan bahwa: *“Key challenges to development: inclusive green growth, infrastructure, and food security.”* Progress report of the DWG 2012 <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131115.pdf>,
* <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/siaran_pers/KP_280610_1.pdf>
* Mendukung Bank Dunia dan Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) untuk menggunakan kemampuannya untuk mendukung program-program pembangunan; dan menjamin bahwa IMF, Bank Dunia dan Bank-bank pembangunan lain mempunyai sumber dana yang mencukupi dalam memainkan peran mereka dalam menangani krisis. Summit Declaration on Financial Markets and the World Economy, 15 November , 2008
* Dalam pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung, pemerintah memilih Cina sebagai pemenang dan bekerja sama dengan konsorsium badan usaha milik negara <http://katadata.co.id/berita/2016/09/05/jokowi-ajak-negara-g-20-garap-proyek-infrastruktur-indonesia>
 |
| ***Variabel Terikat:*** Maka pembangunan infrastruktur di Indonesia akan meningkat ditandai dengan penambahan fasilitas dan program-program pembangunan infrastruktur baru | 1. Kesepakatan tentang pembiyayaan infrastruktur
2. Pembangunan infrastruktur di Indonesia meningkat
3. Penambahan fasilitas dan program
 | * Masalah infrastruktur secara eksplisit menajdi agenda G-20 *Leaders Summit*  pada pertemuan di Tronto tahun 2010. Hal ini di tandai dengan dicapainya satu kesepakatan tentang pembiayaan infrastruktur pada pertemuan tersebut. Berita acara laporan pidato presiden Jokowidodo <http://www.rappler.com/indonesia/143218-jokowi-infrastruktur-pidato-kenegaraan-2016>
* Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan perumahan rakyat Berita acara laporan pidato presiden Jokowidodo <http://www.rappler.com/indonesia/143218-jokowi-infrastruktur-pidato-kenegaraan-2016>
 |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**EKONOMI INTERNASIONAL**

G-20

**Kebijakan Luar Negeri**

**Gubernur Bank Sentral & Menteri Keuangan**

**Konsorsium TROIKA**

* **Pembangunan**
* **Krisis ekonomi**
* **Lingkungan**
* **Anti Korupsi**
* **Energi**
* **Terorisme**

**Krisis Ekonomi Global**

**Kepentingan Nasional**

**Rezim Internasional**

**Indonesia**

**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA**

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
	* + 1. **Teknik analisis data**

Teknik analisis data yang gunakan penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini berupaya mencari pemahaman *(understanding).* Sehingga dapat mendeskripsikan data sesuai dengan temuan di lapangan dan memahami realitas situasi yang ada.

* + - 1. **Metode Penelitian**

Metode merupakan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang secara sistematis dalam menggali kebenaran ilmiah. Metode penelitian merupakan suatu cara yang harus dilakukan oleh peneliti melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan tujuan memecahkan masalah atau mencari jawaban terhadap suatu masalah. Penelitian pada hakikatnya merupakan penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah.

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian. Meteode penelitian yang digunakan adalah :

* **Metode penelitian deskriptif** adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.
* **Metode penelitian historis** yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa suatu fenomena, perkembangan juga peristiwa masa lampau dalam memahami situasi sekarang dan memungkinkan prediksi perkembangannya di masa akan datang.

Dengan demikian, penulis beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif dan historis sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Pada penelitian ini, penulis akan menguraikan suatu kondisi dimana G20 adalah kerjasama ekonomi internasional serta menganalisis dan menguraikan kenapa Indonesia bergabung dengan forum G20 dengan melihat dari faktor kepentingan Nasionalnya dan menjelaskan krisis ekonomi di masa lampau sehingga terbentuknya G-20. Penulis juga menganalisa pengaruhnya terahadap pembangunan infrastruktu di Indonesia.

* + - 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik studi kepustakaan **(library research)** dengan mengumpulkan data dan informasi berdasarkan literatur atau referensi. Studi kepustakaan ini dilakukan melalui serangkaian penulisan atas data-data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah, majalah, koran, serta sumber-sumber informasi lainnya termasuk data dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitan**
2. **Lokasi Penelitian**

Dalam pengumpulan data dan segala bentuk informasi yang penulis butuhkan untuk digunakan sebagai data penelitian bertempat di lokasi sebagai berikut :

* 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Gedung A. A. Maramis II Lantai 6, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710.
	2. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung (UNPAS) Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.
	3. Perpustakaan Umum Universitas Indonesia (UI) Kota Depok, Jawa Barat 16424.
	4. Perpustakaan Umum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.
	5. **Lamanya Penelitian**

Penelitian dan penulisan skripsi ini dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan, yaitu dimulai pada bulan Oktober 2016 sampai dengan Maret 2017.

1. **Sistematika Penulisan**

**Bab I : Pendahuluan**

Merupakan Bab yang menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah yang berupa pembatasan masalah dan permusan masalah. Dimana disertakan juga tentang tujuan dan kegunaan penelitian serta dilengkapi kerangka teoritis, skema kerangka teori dan hipotesis. Yang dimana kedua kerangka tersebut dilengkapi penjelasan akan operasionalisasi variable dan indikator, asumsi-asumsi, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta lokasi dan lama penelitian dan sistematika penulisan

**Bab II : Keanggotaan Indonesia dalam forum G-20**

 Dalam Bab ini, berisi uraian dan penjelasan mengenai latar belakang G-20, bagaimana sejarah awal mula G-20 terbentuk, tujuan dan organisasi seperti apa G-20 , serta bagaimana G20 sebagai sebuah organisasi internasional dalam mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Selain itu, dalam bab ini penulis akan membahas G-20 sebagai forum utama kerjasama ekonomi serta komitmen-komitmen G-20.

**Bab III : Pembangunan Infrastruktur di Indonesia**

Dalam Bab ini, akan membantu 7menganalisis seberapa urgensi Indonesia mengikuti forum G-20 dengan melihat faktor-faktor Indonesia masuk G-20 dan kepentingan Indonesia dalam G-20 dari mitigasi (upaya untuk mengurangi resiko bencana) krisis ke peningkatan citra global, peran dan inisiatif Indonesia dalam proses G-20 dan juga pemenuhan komitmen Indonesia terhadap G-20 dan mengetahui arti penting G-20 bagi Indonesia.

**Bab IV : Analisis Pengaruh G-20 terhadap Pembangunan Infrastruktur di Indonesia**

Dalam Bab ini akan membahas kondisi pembangunan infrastruktur di Indonesia, sebagai salah satu kepentingan Indonesia dalam mengikuti forum G-20 untuk mengatasi persoalan infrastruktur yang menjadi masalah eksplisit dalam G-20. Juga memaparkan karakter forum G-20 dan agenda pembangunan infrastruktur.

**Bab V : Kesimpulan dan Saran**

 Merupakan Bab yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran-saran dari peneliti dalam konteks sebagai peneliti, saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam proses G-20 sehingga Indonesia mendapatkan keuntungan dari partisipasi aktifnya dan meyakinkan bahwa G-20 juga memberi keuntungan yang sama bagi Negara-negara berkembang khususnya pembangunan infrastruktur di Indonesia.

 **Daftar Pustaka**, yaitu link sumber-sumber penelitian

**BAB II**

**KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM FORUM G-20**

1. ***Group Twenty* (G-20)**

G-20 atau dikenal juga dengan Group of Twenty secara resmi beridiri pada tahun 1999 di Jerman. Namun forum intergovernmental ini baru dikenal komunitas internasional secara luas terutama sejak tahun 2008 ketika pemimpin-pemimpinnya memutuskan mengubah tingkat pertemuannya dari level menteri ke level Kepala Negara/ Kepala Pemerintah. G-20 menjadi high profil forum dengan digelarnya KTT pertama di Washington. Pemimpin pun bersepakat untuk mengadakan pertemuan KTT dua kali dalam setahun dengan agenda urgensi untuk mengatasi krisis finansial yang melanda dunia.

 Ide dibentuknya G-20 merupakan tanggapan Negara anggota G-7 terhadap tiga perkembangan uta\ma di akhir tahun 1990an yaitu (1) krisis keuangan di Asia pada tahun 1997, (2) meningkatnya pengaruh Negara-negara *emerging market economies* terhadap perekonomian global, dan (3) munculnya ide dalam forum G-7 tentang pelibatan kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya agar keputusan-keputusan yang disepakati dapat berjalan efektif dan berpengaruh secara luas.

G-20 lebih banyak menjadi ajang konsultasi dan kerja sama hal-hal yang berkaitan dengan sistem moneter internasional. Terdapat pertemuan yang teratur untuk mengkaji, meninjau, dan mendorong diskusi di antara negara industri maju dan sedang berkembang terkemuka mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah pada stabilitas keuangan internasional dan mencari upaya-upaya pemecahan masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu Negara.

G20 dipandang sebagai salah satu forum kerja sama yang dipandang cukup berpengaruh dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan stabilitas sistem keuangan global adalah Forum G20. Indonesia secara terus menerus mendukung upaya G20 dalam mengatasi kerentanan perekonomian domestik terhadap gejolak perekonomian global serta membangun ketahanan ekonomi dunia dalam rangka tercapainya pertumbuhan ekonomi kuat berkelanjutan, dan seimbang; serta tersusunnya strategi pertumbuhan komprehensif (*Comprehensive Growth Strategies*).

 G-20 dibangun sebagai terobosan baru dalam kerjasama multilarisme. Jumlah anggotanya yang 20 dipandang signifikan dan sistematik. Dengan penetapan jumlah yang terbatas, G-20 meyakini kemampuan dan efektivitas untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Keduapuluh anggota secara keseluruhan menguasai 80% lebih perekonomian dunia yang ditandai dengan pertumbuhan GNP, penguasaan aliran investasi asing, pasar, perdangan dunia dan populasi dunia. Asumsi yang diyakini adalah bahwa bila perekonomian di keduapuluh anggota ini sehat, maka akan sehat pula perekonomian seluruh dunia. Sehingga, keberhasilan forum ini akan membawa dampak positif dan sistematik yang signifikan bagi Negara-negara dan entitas ekonomi dunia yang saat tidak menjadi anggota G-20. Pertumbuhan ekonomi di keduapuluh anggota ini akan membawa pertumbuhan yang stabil di Negara-negara lain.[[15]](#footnote-15)

 Ada yang beberapa hal yang menarik tentang G-20. Pertama, asal usul dari G-20 sangat terkait dengan krisis finansial yang melanda Asia Timur pada 1997-1998 sehingga dikatakan G-20 merupaka “anak” dari krisis keuangan internasional. Isu utamanya adalah pembaruan terhadap arsitektur keuangan internasional dengan melibatkan Negara berkembang. Karena itu G-20 pada awalnya adalah forum keuangan dan bukan forum pembangunan.

 Kedua, upaya untuk menciptakan arsitektur keuangan itu bukan dilakukan melalui institusi IMF, akan tetapi dilakukan dengan menciptakan forum *intergovernmental network.* Pilihan ini menggambarkan sikap jalan moderat. Penciptaan institusi baru diluar kerangka IMF dianggap terlalu radikal karena dapat menciptakan kecurigaan dalam institusi-instistui keuangan di seluruh dunia. Namun, pilihan melalui IMF juga dipandang terlalu konservatif.

 Ketiga, kelompok Negara berkembang dalam G-20 plus Negara yang di kategorikam sebagai *emerging market* melibihi jumlah Negara maju G-7. Meski demikian, keunggulan numerik tidak berarti perngaruh Negara berkembang lebih kuat dibandingkan dengan Negara maju. Hal ini disebabkan watak pertemuan dari G-20 adalah forum dialog yang didasatkan konsesus, dimana posisi Negara maju lebih dominan karena memiliki kapasitas sumber daya yang lebih besar. Kementerian keuangan dan bank-bank sentral yang ada di G-7 disebutkan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk merancang agenda, dan memiliki jaringan pengaruh yang luas dan kuat dengan IMF dan Bank Dunia.

 Sebagai suatu forum informal, G-20 tidak memiliki sekretariat dan perangkat organisasi yang tetap. Layanan kesekretariatan disediakan oleh ketua tahun berjalan selama masa tugasnya. Hal ini memperjelas posisi G-20 sebagai sebuah forum kerjasama internasional yang berlandaskan komitmen dan konsesus yang tidak mengikat secara hukum. Walau demikian, G-20 secara diplomatik diakui sebagai sebuah forum yang memiliki reputasi yang tinggi karena dua alasan. Pertama, G-20 memberikan arahan kebijakan ekonomi (*economic policy guidance*) bagi Negara anggotanya. Kedua, G-20 secara tidak langsung dapat mempengaruhi arah kebijakan ekonomi global meningkat anggota G-20 adalah kumpulan Negara yang menghimpun hampir 90% GDP dunia, menguasai 80% total perdagangan dunia dan memiliki dua pertiga penduduk dunia.

 Beragam kepentingan dari anggotanya, jika dilihat secara lebih detail profil masing-masing Negara, G-20 sesungguhnya dapat dibagi dalam tiga kelompok besar yaitu: negara maju anggota G-7/G-8 (Amerika, Jepang, Kanada, Jerman, Perancis, Inggris, Itali) dan non G-8 yaitu Australia dan Korea Selatan; negara BRICS (Brazil, Rusia, China, India, dan Afrika Selatan) sebagai emerging economies; dan negara berkembang seperti Indonesia, Argentina, Mexico, Turki, dan Arab Saudi. Hal ini mengindikasikan dua hal. Pertama, dinamika proses pengambilan keputusan konsensual dalam forum ini akan sangat diwarnai kepentingan yang berbeda dari ketiga kelompok tersebut. Kedua, adanya kesenjangan ekonomi yang cukup besar diantara negara-negara anggota.

1. **Latar Belakang G-20**

Lahirnya G-20 dilatarbelakangi oleh konteks globalisasi yang terus menguat. Beragam tentang globalisasi telah men-sharing-kan suatu pandangan bahwa dunia menjadi semakin kecil, dan tidak ada yang tidak rentan terhadap pengaruh yang terjadi di lingkungan eksternalnya. Saling ketergantungan di antara menjadi ciri sentral dari tren globalisasi kontemporer dan dalam konteks ini kerjasama di antara Negara-negara di dunia menjadi suatu keharusan.[[16]](#footnote-16)

Serangkaian krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1990an membuktikan bahwa dunia baru membutuhkan pendekatan baru untuk merespon dunia yang semakin kecil. Nilai Peso Mexico jatuh di bulan Desember 1994 menandai krisis finansial dini yang imbasnya dirasakan pada Negara-negara di Amerika Selatan. Indonesia, Thailand dan Korea Selatan mengalami krisis moneter yang parah pada tahun 1997 dan dampaknya dirasakan di Negara-negara di kawasan Asia.[[17]](#footnote-17) Kerentanan finansial juga dirasakan di Rusia pada tahun 1998; di Brazil pada tahun 1998-2002, Turki pada tahun 1999-2002, dan Argentina pada tahun 2000-2001.[[18]](#footnote-18) Berbagai Negara seperti China dan India telah merespon krisis dengan berbagai cara; apapun cara yang ditempuh telah beresiko pada meledaknya angka pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat, lebih lanjut ini berdampak sistemik pada transaksi perdagangan dunia.

Krisis finansial yang terjadi pada tahun 1990an tersebut menjadi perhatian serius menteri-menteri keuangan Negara-negara maju dan mengantarkan pada pengakuan bahwa sudah saatnya mereka harus mengajak Negara-negara yang perekonomiannya menguat *(emerging economies*) untuk bergabung dalam diskusi tentang penataan struktur finansial global. Adalah Paul Martin, Menteri Keuangan Kanada dan Lawrence Summer, menteri Keuangan Amerika Serikat yang kemudian mengambil inisiatif untuk memulai penyelenggaraan dialog-dialog G22 dan G33,dimana Negara-negara dengan perekonomian yang signifikan secara geografis dan ekonomik turut diundang di dalamnya. Dialog G-20 yang diselenggarakan pada bulan Desember 1999 dan terus dilembagakan setiap tahunnya hingga saat ini. G-20 disebut oleh para perintisnya sebagai terobosan baru “*to make a smaller world governable and fairer*” (untuk membuat dunia yang semakin kecil dapat dikelola dan lebih adil.” [[19]](#footnote-19)

**Gambar 1 : Sejarah G-20 2008-2016**

 Sumber : Materi Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu RI, 18 Februari 2016

 Pertemuan-pertemuan rutin pun digelar sejak pertemuan pertama G-20 di Berlin, Jerman. G-20 fokus pada penanganan krisis ekonomi, kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, penguatan finansial di masing-masing Negara anggota dan sebagai respon terhadap serangan teroris 9/11 di gedung kembar New York, kerjasama dalam pembekuan pendanaan terorisme. Dialog kemudian mengembangkan diskusi pada pentingnya reformasi lembaga-lembaga keuangan Bretton Woods, IMF dan Bank Dunia. Reformasi ini dilihat sebagai prekondisi penting untuk memperkuat struktur finansial global yang kokoh dalam mengantisipasi krisis ekonomi di masa depan.

 Krisis ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2007 semakin menempatkan pentingnya G-20. Para pendukung pelembagaan G-20 melihat perlunya peningkatan dialog G-20 dari level kementrian ke level Konferensi Tingkat Tinggi. Hanya pemimpin politik yang dapat membuat keputusan-keputusan strategis yang sekalipun tidak *legally binding* (mengikat secara hukum) namun berimplikasi pada pemenuhan komitmen politik yang lebih kuat. Dengan demikian kesepakatan yang dibuat dalam forum intergovernmental di tingkat tertinggi akan membawa penyesuaian-penyesuaian kebijakan di masing-masing Negara, termasuk keputusan yang sifatnya teknis. Menjadikan forum G-20 di tingkat pemimpin tertinggi membuat keputusan-keputusan yang dibuat dalam forum tersebut menjadi ‘implementable’ (bersifat dapat diterapkan).[[20]](#footnote-20)

 Dalam KTT Washington, pemimpin-pemimpin G-20 menyepakati tindakan-tindakan mendesak yang harus dilakukan seperti mengupayakan secara serius tindakan-tindakan untuk menstabilisasi finansial; mendukung kebijakan moneter yang tepat dan diperlukan bagi kondisi Negara; menggunakan kebijakan-kebijakan untuk menstimulasi permintaan Negara bagi dampak yang cepat sementara tetap menjaga kerangka kebijakan yang kondusif bagi keberlanjutan; membantu Negara-negara berkembang untuk mendapatkan akses bagi keuangan dalam kondisi finansial yang sulit termasuk melalui fasilitas likuiditas dan dukung dukungan program; mendukung Bank Dunia dan Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) untuk menggunakan kemampuannya untuk mendukung program-program pembangunan; dan menjamin bahwa IMF, Bank Dunia dan Bank-bank pembangunan lain mempunyai sumber dana yang mencukupi dalam memainkan peran mereka dalam menangani krisis.[[21]](#footnote-21)

 Untuk menghindari perdebatan yang sering terjadi di KTT lain, G-20 fokus pada komonalitas di antara anggota-anggotanya. KTT mengadopsi prinsip-prinsip esensial yang tidak hanya membentuk citra dan nilai simbolik, tetapi juga meningkatkan profil G-20 yang penting secara politik. Ini penting untuk membuat G-20 dapat memulai suatu diskusi tentang bagaimana membangun stabilitas dan kapabilitas untuk mengelola krisis ekonomi, isu-isu yang otoritasnya berada di tangan menteri-menteri keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

 Selain pertemuan tingkat tinggi, pertemuan pejabat senior, menteri keuangan dan Gubernur Bank Sentral, G-20 juga memiliki organ pertemuan Sherpa. Pertemuan Sherpa diselenggarakan sebelum KTT yang dimaksudkan untuk mensinkronisasikan isu-isu yang secara khusus akan diagendakan dalam KTT. Dengan demikian pertemuan di tingkat leader dapat menjadi lebih efektif karena lebih fokus pada masalah-masalah dan kepentingan komonalitas dengan pendekatan yang lebih disepakati bersama di tingkat pejabat senior, kementerian dan pejabat Sherpa.

**Gambar 2 : Siklus Pertemuan G-20**

Sumber : Materi Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu RI, 18 Februari 2016

1. **Komitment-komitment G-20**

Terdapat 93 komitmen yang telah dibuat pemimpin-pemimpin G-20 di KTT London, Washington dan Pittsburgh.[[22]](#footnote-22) KTT G-20 Toronto memperkuat komitmen-komitmen tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan komitmen dan perkembangan ekonomi global dunia. Negara-negara anggota G-20 telah berupaya untuk memenuhi komitmen tersebut. Kerjasama dengan Bank Dunia dan IMF juga dilakukan untuk memfasilitasi pemenuhan komitmen tersebut. Bagian ini akan mendeskripsikan komitmen-komitmen yang telah dibuat terutama sejak KTT pertama kali diselenggarakan di Washington pada tahun 2008 hingga KTT G-20 di Pittsburgh.

**93 komitmen tiga KTT G-20 (Washington, London, Pittsburgh)**

 Sembilanpuluh tiga komitmen yang telah dibuat dalam tiga KTT pertama dapat diidentifikasi sebagai berikut. Komitmen tersebut meliputi komitmen komitmen dalam sektor (1) makro ekonomi,(2) *restoring lending*; (3) *Trade Finance;* (4) reformasi IFI; (5) *Energy and Climate Change;* (6) *Financial Regulation;* (7) *FSB Establishment;* (8*) International Cooperation;* (9) *Prudential regulation;* (10*) Scope of Regulation;* (11) *Transparent Assessment of Regulatory Regimes;* (12)*Compensation* (13) *Tax havens and Non-Cooperative Jurisdictions;* (14) *Accounting Standards;* (15) *Credit Rating Agencies.*

Dalam makro ekonomi, G-20 menyepakati 9 komitmen yang diantaranya meliputi (1) komitmen untuk menyediakan stimulus fiskal untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi *(“deliver the scale of sustained fiscal effort necessary to restore growth”*), (2) komitmen Bank Sentral untuk membuat kebijakan-kebijakan yang luwes sejauh diperlukan dan instrumen-instrumen moneter untuk menjaga stabilitas harga (*Central Banks pledge to maintain expansionary policies for as long as needed and to use the full range of monetary policy instruments, including unconventional instruments consistent with price stability”), (3)* resolusi untuk menjamin ketahanan fiskal dan stabilitas harga jangka panjang dan strategi-strategi untuk keluar dari krisis yang dapat di pertanggungjawabkan, (4) komitmen untuk mengembangkan kebijakan kebijakan dalam kerangkan*“Strong, Sustainable and Balanced Growth”,* (5) komitmen untuk mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan ekonomi dan menahan diri dari upaya devaluasi mata uang; (6) mendaya-gunakan investasi yang didanai program stimulus fiskal untuk tujuan membangun *“a resilient, sustainable and green recovery”* (pemulihan yang kokoh, berkelanjutan dan ramah lingkungan) dan (7) tanggungjawab kolektif untuk meminimalisasi dampak sosial krisis di negara-negara termiskin.[[23]](#footnote-23)

Dalam sektor pemulihan pinjaman (restoring lending), pemimpin-pemimpin G-20 berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan aliran kredit melalui sistem finansial dan menjamin dampak positif lembaga-lembaga yang penting secara sistemik dalam menerapkan kebijakan sesuai dengan kerangka yang telah disepakati dalam G-20 untuk memulihkan sistem peminjaman dan untuk memperbaiki sektor finansial.

Dalam sektor keuangan perdagangan, G-20 bersepakat untuk menjamin ketersediaan sedikitnya USD 250bn dalam jangka waktu dua tahun untuk mendukung keuangan perdagangan melalui agen-agen kredit ekspor dan investasi dan melalui MDBs untuk jangka waktu tiga tahun. Dalam sektor ini juga disepakati fleksibilitas persaratan kapital bagi keuangan perdagangan.

Duapuluh enam (26) komitmen menyangkut reformasi IFI juga disepakati dalam KTT G-20. Keduapuluhenam komitmen tersebut meliputi dari 6 komitmen tentang sumber-sumber IMF termasuk peningkatan dana, 10 tentang sumber-sumber Bank Dunia termasuk peningkatan kapital untuk pinjaman, 1 komitmen bagi fleksibilitas “*Debt Sustainability Framework*”dan 10 komitmen terkait dengan tata kelola IMF dan Bank Dunia termasuk reformasi dalam lembaga keuangan internasional tersebut.

Menyangkut energi dan perubahan iklim, pemimpin-pemimpin G-20 berkomitmen untuk mengambil tindakan dalam menangani ancaman perubahan iklim termasuk upaya membangun kesepakatan dalam negosiasi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC). G-20 juga berkomitmen untuk menghapuskan dan merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien dan memberikan bantuan bagi negara-negara miskin.

Terkait dengan cakupan regulasi, G-20 berkomitmen untuk memperbaiki sistem regulasi untuk menjamin bahwa pemerintah dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan resiko-resiko makro-prudential termasuk dalam bank-bank pengawasan untuk membatasi dampak sistemik. G-20 juga berusaha menjamin bahwa badan otoritatif memiliki kewenangan untuk mengumpulkan informasi yang relevan menyangkut semua lembaga-lembaga finansial material, pasar dan instrumen-instrumen untuk melihat potensi buruk yang dapat menyebabkan dampak sistemik. Namun ditegaskan bahwa upaya ini perlu dikoordinasikan di tingkat internasional. Pemimpin-pemimpin G-20 juga bersepakat untuk meningkatkan regulasi, fungsi dan transparansi pasar finansial dan komoditas untuk mengatasi gejolak harga komoditas yang eksesif.

1. **G-20 Sebagai Forum Utama Kerjasama Ekonomi**

KTT G-20 di Pittsburgh menghasilkan kesepakatan yang penting khususnya menyangkut peran G-20 di masa yang akan datang. Deklarasi finalnya menekan bahwa pemimpin-pemimpin G-20 sejak KTT di Pittsburgh akan bertemu secara regular dan menjamin bahwa delegasi-delegasi mereka akan berusaha hadir dan berpartisipasi aktif dalam semua pertemuan. Ini menegaskan eksistenasi G-20 yang awalnya terkesan bersifat *ad-hoc* menjadi ‘permanen’ untuk jangka waktu yang relative panjang. Deklarasi ini menegaskan dua nilai penting, yaitu sifatnya yang ‘permanen’, pengakuan G-7 terhadap peran emerging economies dan peran kunci G-20 sebagai forum kerjasama ekonomi global maupun regional.

1. **Dari komite *ad hoc* ke lembaga permanen**

Deklarasi di Pittsburg menegaskan bahwa pemimpin G-20 bertekad untuk membuat kehadiran G-20 lebih bersifat permanen. Pemimpin-pemimpin G-20 menyadari bahwa penyelesaian krisis ekonomi membutuhkan solusi yang permanen bukan solusi ad hoc. Untuk itu diperlukan lembaga yang bersifat permanen pula yang memiliki tugas utama untuk membangun arsitektur finansial global yang tahan terhadap krisis.

G-20 meyakini bahwa solusi terhadap krisis ekonomi memprasyaratkan kerjasama yang bersifat global, secara terus menerus. Melalui kerjasama ini dirumuskan cara-cara yang terbaik untuk penyelesaian krisis, baik yang harus dilakukan oleh masing-masing negara anggota G-20 maupun yang harus dilakukan oleh dan melalui lembaga-lembaga finansial internasional. Setiap negara harus mengupayakan sejumlah kebijakan dalam upaya merespon krisis melalui stimulus fiskal, merangsang pemulihan pertumbuhan ekonomi kembali di era krisis, dan kemudian mengupayakan stabilitas perekonomian yang tahan terhadap krisis serupa di masa yang akan datang melalui penguatan sektor keuangan domestik.

Makna ketiga dari deklarasi pemimpin G-20 adalah penempatan G-20 sebagai‘referensi utama’ dari kerjasama ekonomi lain terutama yang melibatkan keanggotaan mereka. Mempertimbangkan kekuatan ekonomi masing-masing anggota G-20, penempatan sebagai forum utama menjadikan G-20 dan kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya sebagai referensi utama bagi aktivitas negara-negara anggotanya, termasuk menjadi rujukan bagi perilakunya di forum-forum serupa baik di tingkat regional maupun di tingkat global.

Dengan demikian, setiap anggota G-20 akan memegang komitmen yang telah mereka buat dalam G-20 dan memenuhinya di tingkat domestik masing-masing. Setiap anggota G-20 juga bertanggungjawab untuk membawa komitmen yang dibuatnya sebagai rujukan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di forum-forum internasional lain dimana mereka menjadi anggotanya.

1. **Peran *emerging economies* dalam arsitektur ekonomi global**

Selain tekad untuk membangun forum yang permanen, deklarasi G-20 sebagai forum utama untuk kerjasama ekonomi di Pittsburg bisa dipahami secara sempit namun dengan makna yang luas. Ini adalah deklarasi pemimpin-pemimpin G-7 yang menegaskan bahwa G-20 adalah satu-satunya forum untuk membicarakan kerjasama ekonomi di antara mereka. Implikasinya adalah bahwa G-7 tidak lagi mengagendakan kerjasama ekonomi di dalam KTT G-7 mereka.

Deklarasi ini bermakna luas karena pemimpin G-7 benar-benar mengakui bahwa forum G-7 tidak lagi mencukupi untuk mendorong kerjasama ekonomi yang kemudian berdampak sistematik pada arsitektur finansial global dan bahwa mereka harus melihbatkan Negara-negara berkembang yang perekonomiannya menguat dan unggul.[[24]](#footnote-24) Keunggulan G-20 adalah bahwa forum ini melibatkan Negara-negara yang perekonomiannya menguat pada beberapa dekade terakhir ini. Penguatan ini tentu saja mempengaruhi perekonomian global secara keseluruhan. Negara-negara ini adalah produsen yang produk-produk sudah mulai menguasai pasar dunia. Negara-negara ini adalah juga konsumen yang potensial, dan karenanya menjadi *global buyers* bagi produk-produk pasar global, termasuk produk Negara-negara maju maupun Negara berkembang.

**Gambar 3 : G-20 Sebagai Forum Utama Kerjasama Ekonomi**



Sumber disusun oleh Y P Hermawan dari berbagai sumber

1. **G-20 sebagai *extra-ordinary* club**

 G-20 bagaimanapun harus dilihat sebagai suatu klub baru, namun dengan jawab yang lebih inklusif. Sebagai klub, forum ini hanya melibatkan sejumlah Negara anggota (19 negara bangsa) dan satu organisasi regional (Uni Eropa) ; sejumlah anggota ini pula yang berkewajiban hadir dalam pertemuan-pertemuan G20 baik di tingkat pejabat senior, kelompok kerja, di tingkat kementerian keuangan dan gubernur bank, di tingkat Sherpa maupun di tingkat KTT. Sejumlah anggota tersebut pula yang ‘memiliki’ hak untuk menyepakati sejumlah komitmen-komitmen dan tentu saja mereka pula yang bertanggungjawab untuk melaksanakan komitmen-komitmen tersebut. Sebagai sebuah klub, G-20 harus memberikan manfaat kepada anggota-anggota karena manfaat itu pula yang akan mendorong keterlibatan anggota-anggota untuk tetap aktif. Kesuksesan sebuah klub yang bermanfaat juga sangat tergantung pada kemampuan Negara-negara anggotanya untuk memenuhi komitmen yang telah dibuat dalam klub tersesbut.[[25]](#footnote-25)

 Namun demikian, G-20 bukanlah *ordinary club* (klub biasa). G-20 adalah klub dengan anggota terbatas namun memiliki tujuan ambisius yang membawa dampak global. G-20 mengklaim bahwa mandatnya adalah : *“Untuk memberikan kontirbusi bagi penguatan arsitektur finansial internasional dan untuk menciptakan peluang-peluang bagi dialog tentang kebijakan-kebijakan nasional, kerjasama internasional dan lembaga-lembaga finansial internasional yang dapat membantu mendukung pertumbuhan dan pembangunan di seluruh dunia.”* [[26]](#footnote-26)

 Mempertimbangkan kerjasama ekslusif ini, G-20 berkeyakinan dapat membawa manfaat yang bukan hanya dapat dinikmati oleh keduapuluh anggotanya, tetapi juga sekira 170 negara lain yang tidak tergabung dalam G-20. Keyakinannya adalah kalau 19 negara plus Uni Eropa berhasil dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkelanjutan dan seimbang, perekonomian dunia akan menjadi kuat, berkelanjutan dan stabil.

 Untuk mencapai sasaran tersebut, G-20 melakukan dua pendekatan sekaligus : (1) Pertama, kelompok ini merangkul Negara-negara yang memiliki modalitas ekonomi yang secara yang secara bersama-sama menguasai sebagian besar perekonomian dunia. (2) Kedua, kelompok ini juga melibatkan perwakilan-perwakilan dari Bank Dunia, IMF dan lembaga-lembaga keuangan global lainnya. Pendekatan pertama memberikan keuntungan bahwa apa yang dilakukan G-20 akan berdampak sistemik yang signifikan terhadap perekonomian regional maupun global. Daya beli masyarakat Indonesia akan meningkat dan dengan demikian akan menjadi ‘pembeli’ produk-produk impor yang masuk ke Indonesia dari Negara-negara tetangga.

 Pendekatan kedua menjamin keberlangsungan tata pengaturan finansial global yang lebih kondusif bagi pemenuhan komitmen-komitmen dalam G-20. Bank Dunia dan IMF adalah lembaga-lembaga keuangan Bretton Woods yang sejak awal dibentuk untuk menjaga stabilitas keuangan dan pembangunan dunia.

 Berdasarkan jumlah PDB, 20 negara tersebut (USD 58.900 Miliar) mewakili 80% PDB Global (USD 73.440 Miliar) dan sejalan dengan Prinsip Pareto. Merekalah yang selama ini telah memainkan peran untuk membantu Negara-negara dalam menjaga stabilitas perekonomian domestik baik di masa normal maupun krisis. Lembaga-lembaga tersbut cukup krusial mengingat dana yang dimilikinya dapat membantu pendanaan pembangunan domestik Negara-negara anggotanya.

**Gambar 4 : Grafik GDP Negara-negara Anggota G-20**

Sumber Informasi : World Bank (2015) – PDB Indonesia pada peringkat 16 sebesar USD 870 Miliar.

 Negara-negara anggota G-20 berkomitmen untuk melakukan koordinasi kebijakan, finansial dan moneter, guna menjamin pertumbuhan ekonomi yang seimbang di antara negara mereka. Kebijakan-kebijakan ini tertuang dalam kerangka bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan seimbang oleh setiap anggota G-20 untuk membuat kebijakan nasional yang terkoordinasi.

**Gambar 5 : menunjukan G-20 Sebagai Steering Committtee**

 Untuk mendukung pencapaian yang maksimal, G-20 juga mengundang Negara-negara dan organisasi regional non anggota yang dipandang dapat memberi kontribusi bagi pertemubuhan perkonomian global yang seimbang. Dalam hal ini, G-20 tetap harus dilihat sebagai G-20 plus , yang prinsipnya tetap terbuka bagi “keikutsertaan” Negara atau lembaga non anggota untuk memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan seimbang. Dalam KTT-KTTnya, G-20 mengundang kehadiran Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), the World Trade Organisation (WTO), the Financial Stability Board (FSB), the United Nations, the New Partnership for Africa Development (NEPAD) dan the Association of South-East Asian Nations (ASEAN) sebagai pengamat observer. Di KTT London, International Labour Organisation (ILO) juga menjadi yang diundang dalam pertemuan pemimpin G-20. [[27]](#footnote-27)

1. **Alasan Indonesia bergabung dengan G-20**

Ada beberapa alasan yang mendasari bergabungnya Indonesia menjadi bagian dari G-20, faktor yang paling utama yang menyebabkan Indonesia masuk ke dalam G-20 adalah karena PDB dari Indonesia adalah salah satu yang tertinggi dan menduduki peringkat 16 sebagai negara dengan PDB tertinggi di dunia, selain itu G-20 sendiri merupakan sebuah forum ekonomi yang penting di mana Indonesia dapat mempromosikan kepentingan ekonomi nasionalnya dan berkontribusi pada pembentukan tata kelola ekonomi global.

Dengan menjadi anggota G-20 tentunya akan memberikan kepercayaan terhadap Indonesia dalam menjaga perekonomian agar mampu bertahan dalam krisis besar yang melanda dunia. Selain itu Indonesia masih mengakui bahwa daya saing nasionalnya masih lemah dan karenanya Indonesia perlu untuk membuat upaya serius untuk meningkatkan daya saing tersebut, dengan menjadi anggota G-20 diharapkan bisa ikut menaikannya. Dan dengan menjadi anggota G-20 Indonesia berharap citra Indonesia maupun ekonomi di dunia global mampu dilihat sebagai suatu negara yang mempunya perekonomian yang baik, hal ini tentu berkaitan dengan citra ekonomi Indonesia di dunia internasional. Selain itu dengan menjadi anggota G-20 Indonesia telah menerapkan prinsip *thousand friends zero enemy* sehingga secara tidak langsung Indonesia telah memberikan citra yang baik di kancah Internasional.

Lebih jauh lagi kenapa Indonesia bergabung dengan G-20 adalah bahwa posisi Indonesia dalam G-20 akan menjadi jalan bagi Indonesia untuk memperluas jaringan diplomasi dan pada saat yang sama membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi dunia, hal ini di karenakan karena posisi Indonesia yang sudah dianggap penting dalam kancah perpolitikan dunia.

Bagi Indonesia, keanggotaannya didalam G-20 merupakan terobosan atau *breakthrough* sekaligus peluang bagi Indonesia untuk menguatkan identitasnya. Indonesia juga berkepentingan untuk ikut serta menentukan arsitektur kebijakan ekonomi politik internasional (Weck, 2013:1). Sejak resmi menjadi anggota G-20 tahun 2008, Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan forum ini sebagai sarana untuk membangun persepsi atau image Indonesia dimata dunia. Indonesia meyakini bahwa G-20 merupakan forum *“economic powerhouse”* dan *“civilisational powerhouse”* karena forum tersebut adalah gabungan dari negara-negara dengan tingkat ekonomi besar dilintas peradaban serta benua (Yudhoyono, 2009). Saat pertemuan KTT G20 di Brisbane, Australia dibulan November 2014, Presiden Joko Widodo juga menjadikan forum ini sebagai salah satu prioritas utama politik luar negeri Indonesia dimasa pemerintahannya dalam rangka mendorong modernitas pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kerangka besar “Poros Maritim Dunia” (Rahman, 2014; Salampessy, 2014).

Sebagai satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G-20, Indonesia telah banyak dipandang sebagai tumpuan yang mampu menjembatani kepentingan negara-negara ASEAN di G-20 (Hermawan dkk., 2011:84). Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, keberadaan Indonesia di G-20 juga diharapkan bisa menjadi salah satu aktor penting yang mampu menjadi ‘jembatan’ yang mengharmoniskan hubungan antar peradaban atau *harmony among civilisations*, khususnya antara Barat dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Selain itu, identias politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif juga diyakini sangatlah relevan serta mampu memberikan konstruksi positif di G-20, khususnya dalam mengikis persepsi negatif *the clash of civilization* atau benturan antar peradaban yang telah diprediksikan akan terjadi, khususnya antara peradaban Barat dengan peradaban Islam setelah berakhirnya masa Perang Dingin ditahun 1990-an (Yudhoyono, 2009a).

1. **Kepentingan Indonesia dalam G-20**

Penelitian ini menemukan setidaknya tiga kepentingan spesifik yang Indonesia perjuangkan dalam proses G-20. Kepentingan tersebut mencakup untuk mengatasi krisis ekonomi, untuk meningkatkan daya saing nasional dan untuk memajukan citra Indonesia di mata masyarakat internasional.

Peran Indonesia dalam setiap KTT G-20 senantiasa memajukan kepentingan negara berkembang dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan (antara lain: usulan pembentukan *global expenditure support fund*, menghindari pembahasan *exit strategy* paket stimulus fiskal yang dapat merugikan negara berkembang, dan mendorong tercapainya konsensus selaku (*bridge builder*). Lebih lanjut peran tersebut antara lain:

1. Indonesia dapat mengedepankan pendekatan konstruktif dalam pembahasan isu di G-20.
2. Semangat G-20 yang mendorong *equality, trust building* dan berorentasi solusi menjadikan forum G-20 menjadi forum yang demokratis di mana semua negara mempunyai kesempatan untuk *speaking on equal footing* dengan negara manapun. Indonesia perlu terus menjaga karakteristik dasar G-20 tersebut dari desakan dominasi ataupun pengerasan sikap/posisi dari negara-negara anggota G-20.
3. Pergeseran posisi Indonesia dari negara *low income countries* menjadi negara *middle income countries* serta dari negara penerima bantuan menjadi negara penerima sekaligus negara donor, membutuhkan penyesuaian profil Indonesia di dunia luar. Untuk itu, peran aktif Indonesia di G-20 menjadi penting karena G-20 dapat dijadikan sebagai wadah untuk instrumen politik luar negeri RI mendukung upaya Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2025.
4. Mengingat Indonesia mempunyai cukup banyak *success stories* dalam program pembangunan, partisipasi Indonesia dalam G-20 dapat digunakan untuk mengedepankan pengalaman Indonesia sebagai kontribusi global Indonesia dalam pembahasan forum G-20. Pada KTT Pittsburgh, misalnya, Indonesia menjadi contoh sukses pengalihan subsidi BBM tidak langsung menjadi subsidi langsung (program BLT). Indonesia dapat bekerjasama dengan Bank Dunia dan OECD untuk mengangkat berbagai *success stories* Indonesia.

Selama berlangsungnya krisis ekonomi global, secara umum kawasan Asia menunjukkan ketahanan yang lebih baik. Beberapa negara berkembang di kawasan ini bahkan tetap dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tingkat moderat yang kemudian menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global. Untuk itu, Indonesia bersama-sama negara di kawasan Asia Pasifik, perlu terus mendorong peran penting kawasan dalam proses *recovery* dan pertumbuhan ekonomi global.

Indonesia berkepentingan untuk mendorong koordinasi kebijakan yang lebih erat antara negara anggota G-20 guna menuju pemulihan ekonomi global dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang. [[28]](#footnote-28)

1. **Penanangan Krisis Ekonomi**

Menjadi anggota G-20 pertama-tama memberikan Indonesia suatu kepercayaan lebih untuk menjaga perekonomian mampu bertahan dalam krisis besar yang melanda dunia. Sejak G-20 menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri pertama di tahun 1999, G-20 telah memfokuskan diri pada cara-cara efektif untuk menangani krisis tersebut. Diyakini bahwa tindakan kolektif sangatlah penting untuk mengatasi krisis ekonomi.

Indonesia telah mengalami sedikitnya dua krisis ekonomi ejak tahun 1990an. Krisis pertama terparah terjadu 1997-1998 yang ditandai dengan jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Krisis moneter ini kemudian berdampak sistemik pada perekonomian Indonesia secara luas, bahkan terjadi krisis multidimensional pada bidang sosial, politik, budaya dan ketahanan. Pada krisis pertama, angkat pengangguran meledak menjadi sekitar 40 juta. Hal tersebut menjadi masalah besar karena mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, seperti contoh kriminalitas.[[29]](#footnote-29) Gizi buruk juga akan memperburuk kondisi kesehatan masyarakat.

Krisis kedua terjadi pada tahun 2008 yang merupakan imbas dari krisis finansial yang terjadi di Amerika Serikat. Walaupun pada krisis kali ini tingkat pengangguran di Indonesia tidak setinggi krisis sebelumnya, Indonesia tetap menerima dampak negatifnya. Pada krisis ini para produsen lokal menghadapi masalah untuk menjual produk-produk di pasar global seperti Amerika Serikat, karena kemampuan *potential global buyers* (masyarakat di Negara maju yang terkena krisis) rendah.

Setelah mengalami dua kali krisis ekonomi, Indonesia memiliki kesempatan untuk memberi kontribusi pada pembentukan arsitektur ekonomi global yang terhadap krisis serupa yang mungkin terjadi di masa depan. Mengkonsolidasikan pemulihan ekonomi dan menghindarkan krisis serupa menjadi kepentingan Indonesia dalam G-20. [[30]](#footnote-30) keduanya dapat dicapaia dengan membuat regulasi-regulasi mendesak dan berkoordinasi dengan anggota-anggota G-20.

1. **Peningkatan daya saing bangsa di tingkat global**

Indonesia mengakui bahwa daya saing nasionalnya masih lemah dan karenanya Indonesia perlu untuk membuat upaya serius meningkatkannya. Daya saing bangsa dapat ditingkatkan melalui dua pendekatan:

Pertama, produk domestik Indonesia masih sulit berkompetisi dengan produk-produk asing dalam pasar global karena produk-produk tersebut gagal untuk memenuhi standard kualitas internasional. Ini merupakan suatu ironi karena Indonesia telah dikenal baik sebagai negara yang memiliki sumber-sumber alam yang sangat kaya, tetapi kurang memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi dan membuat produk-produk yang memenuhi permintaan internasional bagi kualitas standard. Negara-negara maju telah mengembangkan industri mereka di wilayah Indonesia dan kemudian mengekspor produk-produknya ke pasar global. Situasi ini dapat dilihat di daerah Batam, dimana Singapura menjadikan Batam sebagai daerah industrinya dengan menentukan jenis, bahan dan kualitas produk sesuai dengan standar Singapura.[[31]](#footnote-31) Tampaknya sangat banyak agenda bagi Indoneia untuk meningkatkan daya saing nasionalnya.[[32]](#footnote-32)Dengan bergabung dalam klub besar seperti G-20, Indonesia berharap dapat memperoleh keuntungan dengan meningkatkan kemampuan saingnya bagi produk-produk domestik di pasar global.

Bergabung dalam klub besar, Indonesia mendapat suatu di kesempatan untuk meningkatkan credit rating sebagai tempat aman bagi investasi asing. Investasi asing diyakin penting untuk mempromosikan sektor-sektor produktivitas yang berkualitas tinggi. Peningkatan credit rating akan menarik sejumlah besar investasi bagi Indonesia dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi kepentingan nasional vital.

Perspektif kedua untuk meningkatkan daya saing bangsa menekankan pentingnya posisi tawar-menawar (*bargaining position*)yang lebih tinggi dalam arena internasional. Kekuatan tawar merukan faktor determinan untuk memfasilitasi proses negosiasi demi kepentingan nasional Indonesia. Hal ini juga kemudian akan berdampak kepada *political influence* yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia akan mendapat *political influence* yang lebih besar daripada sebelumnya apabila ia dapat mempengaruhi negara-negara lainnya. Ketua Sherpa G-20 Indonesia mengakui bahwa men jadi anggota G-20 telah membantu Indonesia untuk mendapatkan posisi tawar yang diperhitungkan masyarakat internasional.[[33]](#footnote-33) Suara Indonesia sekarang didengar dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain dalam forum-forum internasional. Ini karena kenyataan bahwa Indoensia memperoleh posisi strategis, dengan memiliki akses ke klub ekonomi yang sangat berpengaruh dan memiliki kompetensi untuk mewakili kepentingan-kepentingan bangsa-bangsa lain dalam proses G-20.

Menjadi anggota G-20 menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya global menangani krisis ekonomi telah diakui oleh negara maju dan negara berkembang. Pelaku-pelaku pasar global saat ini memiliki kepentingan yang lebih besar di Indonesia dan siap untuk berinvestasi lebih di negara ini. G-20 adalah forum yang prestisius yang dapat membantu Indonesia dalam menampilkan kinerja dan prestasi positifnya di arena global.

1. **Peningkatan Citra di forum Internasional**

G-20 tidak hanya forum kerjasama ekonomi tetapi juga forum dimana beragam peradaban bertemu satu sama lain. G-20 adalah rumah yang menjadi sumber kekuatan ekonomi dan peradaban, seperti yang dikatakan Susilo Bambang Yudhoyono, *“G-20 untuk pertamakali mempertemukan semua peradaban besar… bukan saja Negara-negara barat, tetapi juga China, Korea Selatan, India, Afrika Selatan dan Negara-negara lainnya, termasuk tiga Negara dengan penduduk muslim yang besar : Arab Saudi, Turki dan Indonesia.”[[34]](#footnote-34)*

Dalam menjalankan pemulihan citra ini tentunya pemerintah Indonesia menyisipkan kepentingan ini ke dalam perangkat politik luar negerinya, antara lain ke dalam tujuan politik luar negeri, sasaran politik luar negeri, serta program dan kebijakan kementerian luar negeri RI. Disebutkan bahwa salah satu tujuan politik luar negeri Indonesia adala untuk meningkatkan citra Indonesia melalui diplomasi publik.[[35]](#footnote-35) Dengan sasaran politik luar negeri untuk menguatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat internasional bagi terpeliharana keutuhan dan integritas Negara kesatuan RI dan pemulihan ekonomi nasional.[[36]](#footnote-36) Dengan demikian, Kementerian Luar Negeri memiliki program dan kebijakan untuk:

1. Meningkatkan peran aktif Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, pemajuan dan perlindungan HAM, serta meningkatkan pembangunan ekonomi, social budaya, keuangan, lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian, investasi, dan perlindungna hak kekayaan intelektual melalui penguatan kerja sama multilateral.
2. Menyinergikan partisipasi Indonesia di G-20 dengan partisipasi Indonesia pada forum-forum lainnya. Selain untuk menyosialisasikan kesepakatan G2-0 untuk mengamankan implementasi komitmen G-20 di tingkat nasional, regional dan global, upaya ini juga ditujukan untuk meningkatkan legitimasi G-20 dan mengurangi stigma G-20 sebagai forum yang ekslusif.
3. Mempromosikan kompatibilitas demokrasi dengan nilai-nilai islam kepada Negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa berdasarkan pengalamana Indonesia.
4. Meningkatkan citra Indonesia di luar negeri sebagai Negara demokratis dengan penduduk mayoritas islam.[[37]](#footnote-37)

Selain dari pihak pemerintah Indonesia, kelompok LSM pun mengakui vitalnya G-20 bagi citra Indonesia. Salah satun responden dari sebuah LSM Internasional menyatakan bahwa forum G-20 menjadi peluang bagi Indonesia. Indonesia tidak dipandang sebagai Negara terbelekang, tetapi benar-benar sebagai yang memiliki potensi. Di forum-forum internasional seperti G-20, Indonesia menjadi dipandang sebagai Negara demokratis dan menjadi saran promosi citra Indonesia yang mendatangkan investasi bagi perekonomian Indonesia.

Dalam forum-forum internasional seperti G-20, Indonesia dipandang sebagai bangsa yang demokratik dan ini memudahkan promosi citra Indonesia ; citra seperti ini akan meningkatkan kepercayaan Indonesia di mata investor asing. Lebih banyak investor asing berarti prospek yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia. Disamping itu, berada dalam G-20 memberikan peluang bagi Indonesia untuk melihat lebih dekat bagaimana Negara-negara maju untuk membuat kebijakan-kebijakan dan kemudian menerapkannya di Indonesia jika dipandang baik dan tepat.

1. **Posisi Indonesia dalam G-20**

Pemerintah Indonesia mengakui bahwa G-20 adalah forum yang pernting dan Indonesia seharusnya berpartisipasi penuh di dalamnya. Ini menjadi dorongan kuat bagi Indonesia untuk memainkan peran serius dalam pertemuan-pertemuan G-20. Bagi Indonesia, G-20 pertama-tama adalah sebuah forum ekonomi yang penting dimana Indonesia dapat mempromosikan kepentingan ekonomi nasionalnya dan berkontribusi pada pembentukan tata kelola ekonomi global. G-20 telah dibentuk tahun 1999 ketika dunia menghadapi krisi ekonomi yang terjadi beberapa Negara di Asia. Pada saat itu G-20 mendiskusikan pendekatan-pendekatan ekonomi untuk mengatasi krisis tersebut. G-20 telah memainkan peran lebih besar sejak tahun 2007 ketika krisis finansial global yang lain melanda perekonomian global.

Khususnya sejak G-20 menyelenggarakan KTT pertamanya di Washington, pemimpin-pemimpin G-20 mulai membuat kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dengan cara yang terkoordinasi. Pemimpin-pemimpin melihat pentingnya kerangka pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan seimbang untuk membangun perekonomian global yang tahan terhadap krisis ekonomi serupa di masa yang akan datang. Pemimpin-pemimpin G-20 juga melihat pentingnya reformasi lembaga-lembaga finansial internasional dan pembentukan arsitektur ekonomi global yang kokoh.

Namun pemimpin-pemimpin Indonesia mengakui bahwa G-20 bukan saja forum ekonomi, tetapi juga forum yang menjadi tempat pertemuan bagi beragam budaya dan peradaban. Mantan Menteri luar negeri Indonesia, Marty Natalegawa menekankan bahwa posisi Indonesia dalam G-20 menjadi jalan bagi Indonesia untuk memperluas jaringan diplomasi dan pada saat yang sama membantu memecahkan masalah yang dunia sedang hadapi. Pada kesempatan lain mantan Menteri luar negeri juga menyampaikan keinginannya untuk menciptakan “Kondisi dimana Indonesia betul-betul dianggap sebagai negara yang memiliki peran dan kepentingan bersifat global”. Untuk mewujudkan itu, keterlibatan Indonesia di PBB dan forum-forum multilateral lain termasuk G-20 akan dimanfaatkan untuk semakin memantapkan peran Indonesia di kancah internasional. Kemudian beliau menambahkan, “G-20 yang secara definisi adalah suatu kelompok terbatas, dimana Indonesia menjadi anggota tetap, menjadi alat untuk menampilkan sosok Indonesia sebagai pemain yang berpengaruh di level dunia”.[[38]](#footnote-38)

Arah ini menegaskan bahwa untuk memajukan kualitas diplomasi ekonomi dalam forum-forum multilateral Indonesia akan berpartisipasi aktif dalam lembaga lembaga multilateral seperti WTO, APEC, G-20 dan G-33 untuk mempromosikan kepentingan Indonesia dan negara-negara berkembang lain.[[39]](#footnote-39)

Untuk melihat seberapa besar pengaruh ekonomi yang dimiliki Indonesia di G-20 mungkin masih jauh diantara negara anggota lainnya yang memang mempunyai kekuatan ekonomi besar. Hal ini sebenarnya yang menjadi dilema tersendiri bagi Indonesia, untuk bisa berdampingan dengan kekuatan besar dunia. Tentunya ada dampak negatif dan posistif yang akan dialami Indonesia. Indonesia merupakan negara ASEAN satu-satunya yang menjadi anggota G-20. Selain Indonesia, ada lima negara Asia lainnya yang menjadi anggota G-20 yaitu, Arab Saudi, Cina, Jepang, India dan Korea Selatan. Kelompok G-20 ini menguasai hampir 90% total produk nasional bruto. G-20 juga menguasai 80% total perdagangan dunia dan dua pertiga penduduk dunia.

Namun banyak juga kalangan yang menilai bahwa Indonesia memang layak masuk dalam kelompok negara berkembang dan berpengaruh di percaturan perekonomian global (Brasil, Rusia, India, Cina). Goldman Sachs yang merupakan perusahaan investasi perbankan di AS pernah membuat daftar sejumlah negara, seperti Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Filipina, Korea Selatan, Turki dan Vietnam dalam rangka mencari BRIC baru.

Kriteria yang digunakan adalah negara dengan stabilitas ekonomi makro, kematangan politik, keterbukaan perdagangan, kebijakan investasi dan kualitas pendidikan. Ekonomi Indonesia berpotensi melakukan akselerasi di saat sebagian besar negara dunia, mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Bersama dengan Cina dan India, Indonesia merupakan negara yang memiliki pertumbuhan positif di tengah krisis melanda ekonomi global selama tahun 2008-2009.

Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang besar untuk secara lebih aktif mengutarakan pandangan-pandangan alternatif di luar dominasi negara-negara besar. Isu-isu yang dapat disuarakan Indonesia dalam forum G- 20 antara lain tentang reformasi struktural dan stabilisasi ekonomi dunia, utang, ketahanan pangan, ketenagakerjaan, dan perdagangan.

Partisipasi aktif Indonesia pada setiap pertemuan G-20 memiliki potensi besar bagi peningkatan kapasitas ekonomi domestik, terutama jika ditinjau dari perspektif perdagangan dan investasi. Singkat kata, G-20 ibarat sebuah amunisi bagi Indonesia untuk mengarahkan sumber daya global bagai kepentingan ekonomi dalam negeri secara lebih optimal.[[40]](#footnote-40)

Gagasan-gagasan yang pernah dilakukan oleh Indonesia adalah dengan :

1. Mengusulkan skema dana siaga global atau global expenditure Support Gund, merupakan mekanisme keuangan yang pernah diusulkan Indonesia di tahun 2008. Usulan ini merupakan sebuah inisiatf untuk membantu proses pemulihan dampak krisis di negara-negara berkembang miskin. Pada dasarnya, GESF merupakan dana cari yang disiapkan untuk membantu negara berkembang dan diharapkan aliran dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pembangunan, infrastruktur, perluasan dan penciptaan lahan pekerjaa, dan pembiayaan keberlangsungan program-program Millenium Depelopment Goals (MDGs).
2. Membentuk Co-chair Working Group 4 (WG4) yang dimotori oleh Indonesia dan Perancis. Indonesia bersama dengan Perancis menyelenggarakan pertemuan WG4 di Jakarta, 2 Maret 2009. Pada dasarnya pertemuan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinterja Bank Pembangunan Multilateral (Mulilateral Developments Bank) dalam mengatasi krisi serta pembenahan manajemen MDB’s dalam proses reformasi agar lebih tanggap dan efektif dalam menghadapi krisi di lain waktu.
3. Mengingatkan KTT agar tidak mengabaikan isu-isu penting lain seperti perubahan iklim, efektivitas bantuan, dan keamanan energi;
4. Memperjuangkan agar forum G-20 menjadi lebih permanen dan dilembagakan.
1. Puspita Eka. “KAJIAN INTEGRASI KEBIJAKAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL DENGAN RPJMN 2015-2019” <http://www.bappenas.go.id/files/3214/7849/3028/Laporan_Kajian_Integrasi_Kebijakan_Kerjasama_Pembangunan_Internasional_dengan_RPJMN_2015-2019.pdf> diakses pada tanggal 30 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. “Proyek Riset G-20”, library.fes.de/**pdf**-files/bueros/indonesien/08366.**pdf.** diakses pada tanggal 22 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-2)
3. Simanangsan Edwin. “Gambaran Umum G-20”. [https://www.ekon.go.id/berita/download/.../materi-pak-edwin.**pdf**](https://www.ekon.go.id/berita/download/.../materi-pak-edwin.pdf)**.** Diakses pada tanggal 23 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-3)
4. ZendarMoh. “Masih Relevenkah G-20 untuk Indonesia” [https://www.academia.edu/9628653/Masih\_Relevankah\_G-20\_un tuk\_Indonesia](https://www.academia.edu/9628653/Masih_Relevankah_G-20_un%20tuk_Indonesia). Diakses pada tanggal 23 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-4)
5. Anonim. "Meningkatkan Pertumbuhan Global Untuk Menciptakan Lapangan Pekerjaan dan Standar Kehidupan Lebih Baik" <http://www.kemenkeu.go.id/SP/hasil-konferensi-tingkat-tinggi-g20-di-brisbane-australia-15-16-november-2014-meningkatkan> di akses pada tanggal 27 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-5)
6. Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030, OECD 2011 [↑](#footnote-ref-6)
7. “Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia” <http://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia> Diakses pada tanggal 27 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-7)
8. Berita acara laporan pidato presiden Jokowidodo <http://www.rappler.com/indonesia/143218-jokowi-infrastruktur-pidato-kenegaraan-2016> Diakses pada tanggal 27 Desember 2016, pukul 20.00 WIB [↑](#footnote-ref-8)
9. Krasner.1982. *Rezim da n Organisasi Internasional.* Intrans Publishing. Malahng,Jatim. Hlm 4. [↑](#footnote-ref-9)
10. K.J Holsti. Politik Internasional, kerangka Untuk Analisis, Jilid II. Terjemahan M. Tahrir Azari. Jakarta : Erlangga. 1988. Hlm. 652-653. [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Prioritas%20Kebijakan%20Makroekonomi%20Global.pdf> [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhammad Fadhil Irawan, “Kesiapan Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Diplomatik Asean Menghadapi Komunitas Asean 2015”, Jurnal HI, 2013, Hlm.24 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline versi 1.1Freeware, (Pusat Bahasa : [www.pusatbahasa.diknas.go.id](http://www.pusatbahasa.diknas.go.id) 2010). [↑](#footnote-ref-13)
14. Effendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan (Cetakan Pertama). Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset [↑](#footnote-ref-14)
15. Proyek Riset G-20, library.fes.de/**pdf**-files/bueros/indonesien/08366.**pdf.** diakses pada tanggal 22 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-15)
16. Keohane, Robert O. (2002). Power and Governance in A Partially Globalized World. London: Routledge; Karns, Margaret P and Mingst, Karen A. (2004) International Organizations: The Politics and Porcess of Global Governance. [↑](#footnote-ref-16)
17. Tentang rangkaian krisis ekonomi dapat dilihat pada Bab 1. Genesis of L-20 project [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid [↑](#footnote-ref-19)
20. Seperti disampaikan oleh Miranda Goeltom, mantan wakil Gubernur Bank Indonesia, dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh BPPK Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia 3 Agustus 2010 [↑](#footnote-ref-20)
21. Summit Declaration on Financial Markets and the World Economy, 15 November , 2008 [↑](#footnote-ref-21)
22. Progress report on the Economic and Financial Actions of the London, Washington and Pittsburgh G-20 Summits, prepared by the UK Chair of the G-20, St, Andrews, 7 November 2009. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid [↑](#footnote-ref-23)
24. Seperti disampaikan oleh sebagaian besar pada responden dari perakilan-perwakilan Negara-negara asing untuk Indonesia pada tanggal 20 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-24)
25. Tentang ini telah menjadi kajian para teoritisi teori klub yang menekankan benefit

yang harus diperoleh oleh anggota klub sebagai determinan dari keberlanjutan

suatu organisasi internasional sebagai suatu klub [↑](#footnote-ref-25)
26. <http://www.g20.org> [↑](#footnote-ref-26)
27. Fact Sheet 3: the G-20, <http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/FactSheet3TheG-20EN> diakses tanggal 12 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-27)
28. <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/G-20.aspx> diakses pada tanggal 1 November 2016. [↑](#footnote-ref-28)
29. <http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/803/803/1/4/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2016. Pukul 21.15 WIB [↑](#footnote-ref-29)
30. Berita wawancara dengan koordinator G-20 untuk isu-isu finansial, kementerian keuangan Indonesia. [↑](#footnote-ref-30)
31. Adriana Elisabeth, ”Kecenderungan dan Tantangan Globalisasi Ekonomi terhadap Politik Luar Negeri Indonesia” dalam Ganewati Wuryandari (ed.), Perkembangan Politik Internasional dan Pengaruhnya terhadap Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta, LIPI Press, 2008, hal. 87. [↑](#footnote-ref-31)
32. <http://www.deplu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=863&l=id/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-32)
33. Seperti disampaikan oleh Ketua Sherpa G-20 Indonesia dalam pidato kunci pada diskusi panel yang diselenggarakan Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral,Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia tanggal 20 September 2010. [↑](#footnote-ref-33)
34. Pidato Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Towards Harmony Among Civilizations di Universitas Harvard, [http://embassyofindonesia.it/towards-harmony-amongcivilizations-speech-by-sbt-at-the-john-f-kennedy-school-of -government-harvarduniversity/](http://embassyofindonesia.it/towards-harmony-amongcivilizations-speech-by-sbt-at-the-john-f-kennedy-school-of%20-government-harvarduniversity/) diakses pada tanggal 31 Oktober 2016, pukul 11.20 WIB. [↑](#footnote-ref-34)
35. Tujuan Politik Luar Negeri RI diambi dari <http://www.deplu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=19&l=id/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2016, pukul 12.25 WIB. [↑](#footnote-ref-35)
36. Sasaran Politik Luar Negeri RI diambil dari <http://www.deplu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=22&l=id/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2016. Pukul 12.35 WIB. [↑](#footnote-ref-36)
37. Program dan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI, <http://www.deplu.go.idPages/Polugri.aspx?IDP=11&l=id/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2016, pukul 13.10 WIB. [↑](#footnote-ref-37)
38. <http://embassyofindonesia.it/towards-harmonyamong-civilizations-speech-by-sby-at-the-john-f-kennedy-school-of-governmentharvard-university/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibid 27 [↑](#footnote-ref-39)
40. Abdul Hakim MS , “Indonesia di Pusaran G-20”, , <http://www.investor.co.id/home/indonesia-di-pusaran-g-20/39176>, diakses tanggal 17 November 2016, pukul 15.50 WIB [↑](#footnote-ref-40)